

**EFEKTIFITAS PROGRAM PENGAWASAN DAGING DAN TELUR DI UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI KESEHATAN HEWAN DAN MASYARAKAT  
PROVINSI SULAWESI**

**RAFLI A.W RONDONUWU**

**GUSTAAF B. TAMPI**

**HELLY F. KOLON DAM**

[raflirondonuwu14@gmail.com](mailto:raflirondonuwu14@gmail.com)

**ABSTRACT**

*This research aims to determine the effectiveness of the Meat and Egg Control Services in the Regional Technical Implementation Unit of the Animal and Community Health Center of North Sulawesi Province. This study uses a qualitative method. The techniques used in data collection in this study were interviews, observation and documentation. After the data was collected, the data were analyzed qualitatively with a descriptive narrative supported by primary and secondary data. The results of this study indicate that, the effectiveness of services carried out by the UPTD Center for Animal and Community Health of North Sulawesi Province has been running well, but the obstacles faced are limited experts and insufficient budget.*

*Keywords: Service Effectiveness, Supervision, UPTD, Laboratory*

**PENDAHULUAN**

Masyarakat berhak atas berbagai layanan yang harus diberikan oleh pemerintah karena pada dasarnya pemerintah dibentuk untuk melayani masyarakat, atau dengan kata lain pemerintah berkewajiban penuh untuk memberikan layanan kepada masyarakat.

Salah satu dari pelaksanaan pelayanan public yaitu program pengawasan daging dan telur di UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Masyarakat Provinsi Sulawesi Utara. Program pengawasan yang dilakukan oleh UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Masyarakat Provinsi Sulawesi Utara merupakan program yang bertujuan untuk memastikan setiap produk hewani yaitu daging dan telur yang beredar di pasaran, adalah selalu aman untuk dikonsumsi oleh semua masyarakat di Sulawesi Utara.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Pasal 58 ayat (1) "Dalam

rangka menjamin produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal, Pemerintah dan pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, pengujian, standarisasi, sertifikasi, dan registrasi produk hewan Maka dari itu UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Masyarakat Provinsi Sulawesi Utara dibawah pengawasan dari Dinas Pertanian Dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara, menjadi instansi yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan fungsi pengawasan dari kualitas produk hewani yang beredar di daerah Sulawesi Utara dan memastikan bahwa itu aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat.

Namun ada beberapa keluhan dari masyarakat tentang pengawasan yang dilakukan oleh UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Masyarakat Provinsi Sulawesi Utara yaitu tim pegawai tidak rutin melakukan pengawasan dan hanya melakukan pengawasan hanya jika sudah mendekati hari-hari besar keagamaan seperti hari raya Natal dan Lebaran saja.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka saya tertarik untuk memilih judul “Efektifitas Program Pengawasan Daging Dan Telur Di UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Masyarakat Provinsi Sulawesi Utara”.

## TINJAUAN PUSTAKA

Secara harafiah, kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu efektif yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif berarti dapat membuahkan hasil, mulai berlaku, ada pengaruh/akibat/efeknya. Efektivitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan.

Menurut Mahmudi (2005:92) efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (Sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Efektivitas berfokus pada outcome (Hasil) suatu organisasi, program atau kegiatan yang dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka efektifitas adalah menggambarkan seluruh siklus input, proses, dan output yang mengacu pada hasil guna dari pada suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauh mana tujuan (Kualitas, kuantitas dan waktu) telah tercapai, serta ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya dan mencapai target-targetnya. Hal ini berarti, bahwa pengertian efektifitas yang dipentingkan semata – mata hasil tujuan yang dikehendaki.

Jadi dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu konsep yang dapat dipakai sebagai sarana untuk mengukur keberhasilan suatu organisasi yang dapat diwujudkan dengan tetap memperhatikan faktor biaya, tenaga, waktu, sarana dan prasarana dengan tetap memperhatikan resiko dan keadaan yang dihadapi

Pengertian Program adalah unsur pertama yang harus ada demi tercapainya suatu kegiatan. Di dalam program dibuat beberapa aspek, disebutkan bahwa di dalam setiap program dijelaskan mengenai:

1. Tujuan kegiatan yang akan dicapai.
2. Kegiatan yang diambil dalam mencapai tujuan.
3. Aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui.
4. Perkiraan anggaran yang dibutuhkan
5. Strategi pelaksanaan.

Melalui program, maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasikan. Hal ini sesuai dengan pengertian program yaitu kumpulan proyek-proyek yang berhubungan telah dirancang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang harmonis dan secara integral untuk mencapai sasaran kebijaksanaan tersebut secara keseluruhan. Program dapat pula dijelaskan sebagai kebijakan dalam hal tujuan yang ingin dicapai. Program tersebut merupakan langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Menurut Charles O. Jones(1996:295) Pengertian program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan, beberapa karakteristik tertentu yang dapat membantu seseorang untuk mengidentifikasi suatu aktivis sebagai program atau tidak, yaitu:

1. Program cenderung membutuhkan staf, misalnya untuk melaksanakan atau sebagai pelaku program
2. Program biasanya memiliki anggaran tersendiri, program kadang biasanya juga diidentifikasi melalui anggaran.
3. Program memiliki identitas sendiri, yang bila berjalan secara efektif dapat diakui oleh publik.

Program terbaik di dunia adalah program yang didasarkan pada model teoritis yang jelas, yakni sebelum menentukan masalah sosial yang ingin diatasi dan memulai melakukan intervensi, maka

sebelumnya harus ada pemikiran yang serius terhadap bagaimana dan mengapa masalah itu terjadi dan apa yang menjadi solusi terbaik. Apabila program dikaitkan dengan efektivitas maka keefektivasan suatu program tersebut dapat diukur dan dapat dinyatakan berhasil pelaksanaannya atau sebaliknya. Seperti Program pengawasan daging dan telur yang sedang dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Utara yaitu untuk memastikan semua produk daging dan telur yang beredar di masyarakat aman untuk dikonsumsi, apakah program tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan sarannya atau malah sebaliknya.

Ada beberapa aspek dari efektivitas suatu program Menurut Muasaroh (2010: 13) yaitu

1. Aspek tugas atau fungsi, yaitu lembaga dikatakan efektivitas jika melaksanakan tugas atau fungsinya
2. Aspek rencana atau program, yang dimaksud dengan rencana atau program disini adalah rencana pembelajaran yang terprogram, jika seluruh rencana dapat dilaksanakan maka rencana atau program dikatakan efektif;
3. Aspek ketentuan dan peraturan, efektivitas suatu program juga dapat dilihat dari berfungsi atau tidaknya aturan yang telah dibuat dalam rangka menjaga berlangsungnya proses kegiatannya. Aspek tujuan atau kondisi ideal, suatu program kegiatan dikatakan efektif dari sudut hasil jika tujuan atau kondisi ideal program tersebut dapat dicapai.

Pengertian Pengawasan menurut Kamus Besar Indonesia mendefinisikan istilah pengawasan berasal dari kata "Awat" yang artinya memperhatikan baik baik, dalam arti sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuai memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang diawasi (Sujanto, 1986:2)

Jadi pengawasan itu mengukur pelaksanaan dibandingkan dengan cita-cita

dan rencana, memperlihatkan dimana ada penyimpangan yang negatif dan dengan menggerakkan tindakan-tindakan untuk memperbaiki penyimpangan-penyimpangan, membantu menjamin tercapainya rencana-rencana (Salinderho, 1998:39).

Konsep pengawasan demikian sebenarnya menunjukkan pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen, dimana pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak dibawahnya. Dalam ilmu manajemen, pengawasan ditempatkan sebagai tahapan terakhir dari fungsi manajemen. Dari segi manajerial, pengawasan mengandung makna pula sebagai pengamatan atas pelaksanaan seluruh kegiatan unit organisasi yang diperiksa untuk menjamin agar seluruh pekerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan atau suatu usaha agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, dan dengan adanya pengawasan dapat memperkecil timbulnya hambatan, sedangkan hambatan yang telah terjadi dapat segera diketahui yang kemudian dapat dilakukan tindakan perbaikannya

## **METODE PENELITIAN**

### **Metode Yang Digunakan**

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi deskriptif kualitatif. Menurut Moleong (2007:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan secara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan Bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektifitas pengawasan Daging dan Telur yang dilakukan oleh UPTD Balai Kesehatan Hewan Dan Masyarakat

Provinsi Sulawesi Utara. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian dari efektivitas pelayanan program pengawasan daging dan telur di UPTD balai kesehatan hewan provinsi Sulawesi Utara, menggunakan teori efektivitas program Muaaroh (2010:13) efektifitas suatu program dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu :

1. Aspek rencana atau program
2. Aspek tugas atau fungsi
3. Aspek ketentuan dan peraturan

### **Lokasi Penelitian**

Pengambilan lokasi pada penelitian ini adalah di UPTD Balai Kesehatan Hewan Dan Masyarakat Provinsi Sulawesi Utara.

### **Sumber Data**

Salah satu sifat penelitian kualitatif adalah tidak terlalu mementingkan jumlah sumber data atau informan, tetapi lebih mementingkan isi (content), relevansi, sumber/informan yang benar-benar dapat memberikan informasi baik mengenai orang, peristiwa atau hal.

### **Informan**

Salah satu sifat penelitian kualitatif ialah tidak mementingkan jumlah informan, tetapi yang lebih dipentingkan ialah content, relevansi, dan sumber atau informan yang benar-benar dapat memberikan informasi, baik mengenai orang, peristiwa atau hal. Informan dalam penelitian kualitatif berkembang terus atau terus bergulir menggelinding seperti bola salju (snowball), secara bertujuan (purposive) sampai data yang dikumpulkan dianggap memuaskan (Bungin, 2010).

Informan pada penelitian ini diambil dari pimpinan dan pegawai di UPTD balai kesehatan hewan provinsi Sulawesi Utara. Dengan mengambil informan diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi yang lengkap dan reliabel. Adapun rincian informan adalah sebagai berikut:

1. Kepala Laboratorium Pemeriksaan : 1 orang
2. Staf pegawai laboratorium Pemeriksaan : 3 orang

### **Instrumen Penelitian**

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dalam penelitian kualitatif peneliti merupakan instrumen utama. Atas pertimbangan inilah maka dalam pengumpulan data pada penelitian ini digunakan teknik sebagai berikut

1. Wawancara (Interview).

Wawancara dilakukan pada informan yang telah ditentukan untuk mendapatkan data dan informasi yang jelas dan akurat tentang berbagai hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam wawancara ini digunakan pedoman wawancara sebagai panduan wawancara agar dapat lebih terfokus dan konsistensi hasil pendataan.

2. Studi dokumentasi.

Studi dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder pendukung data primer hasil wawancara

### **Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian kualitatif, kegiatan analisis data diperoleh sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai dilapangan. Namun faktanya analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data. Data terkumpul harus diolah sedemikian rupa sehingga menjadi informasi yang dapat digunakan dalam menjawab perumusan masalah yang diteliti. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas.

Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2009) mengemukakan aktivitas dalam analisis data kualitatif yaitu meliputi:

a. Data *Display* (Model Data)

Langkah utama yang kedua dari kegiatan analisis data adalah model data. Model didefinisikan sebagai suatu kumpulan informasi yang tersusun untuk mendeskripsikan kesimpulan dan pengambilan Tindakan.

b. Data *Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis. Sebagaimana kita ketahui reduksi data terjadi secara kontinyu melalui kehidupan suatu proyek yang diorientasikan secara kualitatif. Reduksi data antisipasi terjadi sebagaimana diputuskan oleh peneliti yang mana kerangka konseptual, pertanyaan penelitian, pendekatan pengumpulan data untuk dipilih.

c. *Conclusion Drawing* (Verifikasi)

Langkah ketiga dari analisis adalah penarikan verifikasi kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai memutuskan apakah makna sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kausal, dan proposisi-proposisi. Peneliti yang kompeten dapat menangani kesimpulan-kesimpulan ini secara jelas, memelihara kejujuran dan kecurigaan tetapi kesimpulan masih jauh, baru mulai dan pertama masih sama kemudian meningkat menjadi eksplisit dan mendasar. tetapi kesimpulan masih jauh, baru mulai dan pertama masih sama kemudian meningkat menjadi eksplisit dan mendasar.

## PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Balai Laboratorium Kesehatan Hewan & Kesehatan Masyarakat Veteriner memiliki visi yaitu Terwujudnya pelayanan penyidikan, pengujian dan diagnosa yang prima dan profesional. Pengertian prima adalah: Balai Laboratorium Kesehatan Hewan & Kesehatan Masyarakat Veteriner

dalam melayani masyarakat penyidikan, pengujian dan diagnosa mengutamakan kecepatan layanan yang potensial zoonosis. Pengertian profesional: Balai Laboratorium Kesehatan Hewan & Kesehatan Masyarakat Veteriner dalam melaksanakan fungsi layanan penyidikan, pengujian dan diagnosa mengacu pada standar yang sudah diakui nasional atau dunia, tidak terpengaruh karena kepentingan tertentu yang tidak berdasar fakta nyata hasil uji atau diagnosa.

Untuk dapat mewujudkan visi tersebut maka misi yang akan dijalankan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Hewan & Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah:

1. Meningkatkan dan memelihara kecepatan, ketepatan dalam penyidikan, pengujian, surveilans dan diagnosa.
2. Meningkatkan kemampuan dan profesionalisme dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi kegiatan.
3. Mengutamakan pelayanan penyidikan dan diagnosa wabah.
4. Melakukan layanan surveilans penyakit hewan strategis, endemis, eksotis maupun ekonomis.
5. Meningkatkan kualitas dan kecepatan layanan kepada pelanggan serta membina kerjasama dengan pelanggan.

Balai Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner merupakan salah satu unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.61/Permentan/OT.140/5/2013 tanggal 24 Mei 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Veteriner dan memiliki beberapa fungsi diantaranya

1. pelaksanaan penyidikan penyakit hewan,
2. pemeriksaan dan pengujian produk asal hewan,

3. surveilans penyakit hewan dan produk hewan,
4. diagnosa penyakit hewan, sebagai laboratorium rujukan penyakit tertentu,
5. sertifikasi hasil uji, pengujian forensik veteriner,
6. public awareness, melaksanakan kajian terbatas teknis veteriner,
7. pengujian toksikologi veteriner dan keamanan pakan,
8. bimbingan teknis laboratorium veteriner dan puskesmas,
9. pengolahan data pengamatan, diagnosa dan pengujian produk asal hewan,
10. pengembangan sistem dan diseminasi informasi veteriner
11. pembuatan peta penyakit regional.

Wilayah pelayanan Balai Laboratorium Kesehatan Hewan & Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah di Provinsi Sulawesi Utara. Laboratorium pengujian Balai Laboratorium Kesehatan Hewan & Kesehatan Masyarakat Veteriner telah mendapatkan sertifikat akreditasi ISO-17025 dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan No.LP-187-IDN pada bulan Desember 2003 yang mencakup 22 ruang lingkup pengujian. Berdasarkan Surat Keputusan Komite Akreditasi Nasional tanggal 17 Juli 2014, status akreditasi untuk 22 ruang lingkup uji tersebut layak dapat dipertahankan. Pada tanggal 17 Desember 2013, KAN mengakui dan meningkatkan ruang lingkup uji laboratorium pengujian pada Balai Veteriner yang mendapat pengakuan menjadi 50 ruang lingkup uji. Berdasarkan sertifikat SNI/ISO/IEC 17025 :2017 dari KAN dengan No. LP- 799 IDN yang berlaku hingga tanggal 16 Oktober 2022.

Dalam sistem manajemen, Balai Laboratorium Kesehatan Hewan & Kesehatan Masyarakat Veteriner telah mendapatkan sertifikasi ISO 9001: 2008 pada tahun 2003. Sertifikat dalam bidang manajemen mutu ini dapat dipertahankan

hingga sekarang ISO 9001:2015 dengan ruang lingkup Surveilans, Penyidikan, Diagnosa Penyakit Hewan dan Pengujian Produk Asal Hewan. Dalam menunjang tugas pokok dan fungsinya, Balai Veteriner dilengkapi dengan laboratorium Virologi, Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner, Laboratorium Bakteriologi, Laboratorium Parasitologi, Laboratorium Patologi, Laboratorium Patologi dan Laboratorium Biosafety Level 2 (BSL2).

Balai Laboratorium Kesehatan Hewan & Kesehatan Masyarakat Veteriner merupakan laboratorium kesehatan hewan dan kesmavet yang terbaik dan terbesar di Sulawesi Utara. Sumber daya manusia (SDM) baik jumlah kualitas memerlukan peningkatan setiap tahun melalui pengusulan formasi pegawai kepusat, pelatihan sumber daya manusia, peningkatan status pendidikan untuk tenaga laboratorium maupun administrasi. Karena itu diperlukan adanya penambahan jumlah pegawai negeri sipil (PNS) maupun pendidikan lanjut keperguruan tinggi atau pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas dan kapabilitasnya. Banyaknya PNS yang akan mengalami pensiun perlu adanya pengantian bagi mereka yang memasuki berakhirnya masa pengabdian.

Balai Laboratorium Kesehatan Hewan & Kesehatan Masyarakat Veteriner secara khusus melaksanakan surveilans beberapa penyakit strategis nasional dan menjadi prioritas nasional yaitu penyakit Rabies, Avian Influenza, Brucellosis, Anthrax, Classical Swine Fever (CSF). Walaupun sudah bebas dari penyakit brucellosis, namun sebagai pulau yang masih tergantung dari pulau atau negara lain sebagai sumber ternak sapi, brucellosis masih menjadi ancaman dan perhatian dari Balai Laboratorium Kesehatan Hewan & Kesehatan Masyarakat Veteriner, Anthrax merupakan salah satu penyakit strategis yang menjadi prioritas nasional namun penyakit ini tidak pernah diternukan di Sulawesi Utara.

Tetapi karena sifat penyakitnya yang menular dan zoonosis serta Sulawesi Utara masih mendatangkan sapi dari daerah endemis anthrax, maka penyakit ini juga mendapatkan perhatian dari Balai Laboratorium Kesehatan Hewan & Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Beberapa penyakit strategis lainnya yang menjadi perhatian Balai Laboratorium Kesehatan Hewan & Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah penyakit Jembrana pada sapi Bali dan penyakit Surra. Kedua penyakit ini masih sering muncul secara sporadik pada sapi, khususnya sapi Bali untuk penyakit Jembrana serta ternak sapi, kerbau dan satwa liar (rusa) untuk penyakit Surra. Penyakit lain yang menjadi masalah dan sering muncul secara sporadis pada ternak sapi adalah Bovine Viral Diarrhea (BVD) atau Diare Ganas pada sapi.

Sulawesi sebagaimana pulau lainnya masih bebas dari penyakit eksotik yang menjadi perhatian nasional yaitu Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), African Swine Fever (ASF), serta Bovine Spongiform encephalopathy (BSE). Ketiga penyakit ini juga menjadi perhatian dalam pelaksanaan surveilans kewaspadaan dini melalui surveilans aktif di perbatasan dan Rumah Potong Hewan (RPH).

Penyakit-penyakit lain yang zoonosis atau merugikan secara ekonomi juga menjadi perhatian Balai Laboratorium Kesehatan Hewan & Kesehatan Masyarakat Veteriner seperti infestasi parasit saluran cerna, penyakit viral Infectious bovine rhinotracheitis (IBR)/ Infectious Pustular Vulvovaginitis (IPV) dan masalah gangguan reproduksi pada sapi.

Balai Laboratorium Kesehatan Hewan & Kesehatan Masyarakat Veteriner berdasarkan penunjukan dari Menteri Pertanian merupakan Laboratorium rujukan untuk pengujian penyakit Surra dan penyakit viral Infectious bovine rhinotracheitis IBR/ Infectious Pustular Vulvovaginitis (IPV). Adanya fungsi tambahan yang bersifat khusus tersebut maka diperlukan pengembangan

laboratorium parasitologi dan virologi yang melaksanakan fungsi sebagai laboratorium rujukan penyakit surra dan IBR. Selain itu diperlukan juga dukungan beberapa peralatan dan pengembangan sumber daya manusia sehingga fungsi sebagai rujukan penyakit surra dan IBR dapat dilaksanakan dengan baik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 61/Permentan/00T.140/5/2013 tanggal 24 Mei 2013, tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Veteriner, maka tugas Balai Laboratorium Kesehatan Hewan & Kesehatan Masyarakat Veteriner sesuai dengan isi Bab I pasal 2 tugas Balai Veteriner BVet adalah melaksanakan tugas pengamatan dan pengidentifikasian, diagnosa, pengujian veteriner dan produk hewan. Dalam mengemban tugas tersebut maka Balai Veteriner memiliki beberapa fungsi yaitu:

- a. Penyusunan program, rencana kerja, dan anggaran, pelaksanaan kerjasama, serta penyiapan evaluasi dan kerjasarna.
- b. Pelaksanaan penyidikan penyakit hewan.
- c. Pelaksanaan penyidikan melalui pemeriksaan dan surveilans pengujian produk asal hewan.
- d. Pelaksanaan surveilans penyakit hewan dan produk hewan.
- e. Pemeriksaan kesehatan hewan, semen, embrio, dan pelaksanaan diagnosa penyakit hewan.
- f. Pembuatan peta penyakit hewan. Pelaksanaan pelayanan laboratorium.
- g. Rujukan dan acuan diagnosa penyakit hewan menular.
- h. Pelaksanaan pengujian dan pemberian laporan/atau sertifikasi hasil uji.
- i. Pelaksanaan pengujian forensik veteriner. Pelaksanaan peningkatan kesadaran masyarakat (public awareness).
- j. Pelaksanaan kajian terbatas teknis veteriner.
- k. Pelaksanaan pengujian toksikologi veteriner dan keamanan pakan.

- l. Pemberian bimbingan teknis laboratorium veteriner, pusat kesehatan hewan, dan kesejahteraan hewan.
- m. Pemberian rekomendasi hasil pemeriksaan dan pengujian veteriner, serta bimbingan teknis penanggulangan penyakit hewan.
- n. Pelaksanaan analisa resiko penyakit hewan dan keamanan produk hewan di regional.
- o. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
- p. Pengkajian batas maksimum residu obat hewan dan cemaran mikroba.
- q. Pemberian layanan teknis penyidikan, pengujian veteriner dan produk hewan.
- r. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data pengamatan serta pengidentifikasian diagnosa, pengujian veteriner dan produk hewan.
- s. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Veteriner.

Untuk menjaga keamanan dan keselamatan, bioscurity dan biosafety, serta penjaminan mutu dan kecepatan layanan pengujian, Balai Veteriner sudah menerapkan sistem biorisk yaitu akses terbatas di area laboratorium pengujian dan masih memerlukan dukungan berbagai peralatan pengujian, peralatan keamanan dan keselamatan dalam bekerja dengan bahan-bahan berbahaya, penanganan dan pengolahan limbah cair serta peningkatan sarana fisik bangunan, laboratorium serta penunjangnya.

Balai Laboratorium Kesehatan Hewan & Kesehatan Masyarakat Veteriner secara khusus melaksanakan surveilans beberapa penyakit strategis nasional dan menjadi prioritas nasional yaitu penyakit Rabies, Avian Influenza, Brucellosis, Anthrax, Classical Swine Fever (CSF). Walaupun sudah bebas dari penyakit brucellosis, namun sebagai pulau yang masih tergantung dari pulau atau negara lain sebagai

sumber ternak sapi, brucellosis masih menjadi ancaman dan perhatian dari Balai Laboratorium Kesehatan Hewan & Kesehatan Masyarakat Veteriner

Balai Laboratorium Kesehatan Hewan & Kesehatan Masyarakat Veteriner juga memberikan dukungan dalam upaya pengendalian penyakit hewan menular strategis di wilayah Sulawesi Utara meliputi:

- a. Pembuatan dan penyusunan roadmap Rabies se-Sulawesi Utara
- b. Pembuktian bebas penyakit Anthrax (tidak ada kasus)
- c. Upaya pembebasan Avian Influenza (profiling, zona bebas, kompartemen).
- d. Penyakit Hog Cholera (sedang proses pembebasan dimulai dari Provinsi Sulawesi Utara)
- e. Upaya pembebasan penyakit Jembrana di Pulau Sulawesi melalui vaksinasi. Upaya dalam mempertahankan bebas kasus African Swine Fever (ASF) di Sulawesi Utara

Dalam pelaksanaan tugas layanan ke masyarakat, Balai Laboratorium Kesehatan Hewan & Kesehatan Masyarakat Veteriner telah mencapai beberapa keberhasilan antara lain:

- a. Mempertahankan status Sulawesi Utara bebas dari penyakit brucellosis.
- b. Mempertahankan Sulawesi Utara tetap bebas dari penyakit anthrax.
- c. Mempertahankan Sulawesi Utara tetap bebas dari penyakit eksotis PMK dan BSE.
- d. Aplikasi IV-Lab (Integrated Veterinary Laboratory Information System) dalam mendukung pengendalian penyakit hewan dan zoonosis yang dibuat oleh salah satu pegawai Balai Laboratorium Kesehatan Hewan & Kesehatan Masyarakat Veteriner dan telah digunakan oleh 8 Balai Besar Veteriner/ Balai Veteriner di Indonesia.

- e. Mempertahankan status akreditasi laboratorium ISO 17025:2017 oleh KAN dengan 52 ruang lingkup pengujian serta mempertahankan status sertifikasi manajemen ISO 9001:2015.

Keberhasilan lain yang terlihat antara lain adalah peningkatan PNBP, terjadinya kerjasama dengan FAO dalam sistem informasi on line tentang penyakit Avian Influenza, terjalinnya kerjasama dengan laboratorium Predict dalam peningkatan kemampuan SDM virologi untuk pengujian penyakit pada satwa liar (burung belibis), kecepatan layanan Balai dalam penyidikan wabah penyakit menular di wilayah Sulawesi Utara.

Laboratorium rujukan Surra dan Infectious Bovine Rhinotracheitis (IBR). Merujuk Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 4026/Kpts/OT.140/4/2013 tanggal 1 April 2013 tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis yang sudah ada di Indonesia salah satunya adalah Surra yang menjadi prioritas pengendalian dan penanggulangannya di daerah tertular serta berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian — Nomor: 89/Kpts/PD.620/1/2012 tentang Penunjukan Laboratorium Veteriner sebagai Laboratorium Rujukan Pengujian Penyakit Hewan Menular Tertentu menunjuk Balai Laboratorium Kesehatan Hewan & Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagai Laboratorium rujukan pengujian penyakit hewan menular tertentu yaitu Surra dan Infectious Bovine Rhinotracheitis (IBR), maka Balai Laboratorium Kesehatan Hewan & Kesehatan Masyarakat Veteriner berkewajiban menyiapkan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan dalam pengujian penyakit hewan menular tertentu tersebut dengan memberikan pelatihan khusus, peralatan dan bahan yang dibutuhkan untuk pengujian penyakit hewan menular tertentu, metode standar dan anggaran untuk melakukan kegiatan pengujian penyakit hewan menular tertentu yang menjadi rujukan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa efektifitas pelayanan program pengawasan daging dan telur di UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Masyarakat Provinsi Sulawesi Utara telah dilakukan berdasarkan aspek rencana atau program, aspek tugas atau fungsi dan aspek ketentuan dan peraturan atau kebijakan. Efektivitas pelayanan program pengawasan dari ketigas aspek tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut :

1. Efektivitas pelayanan program pengawasan daging dan telur melalui aspek rencana atau program telah dilakukan dengan sasaran yaitu pedagang di pasar tradisional, pasar swalayan dan peternak. Pada di tahun 2020 mengalami perubahan program pengawasan sehingga menjadi kurang efektif akibat pandemic Covid 19. Pengawasan yang sesuai rencana kerja dilakukan setiap bulan akan tetapi hanya dilakukan dari bulan Januari sampai dengan bulan April 2020. Perubahan juga terjadi pada anggaran tahun 2020 yang mengalami pergeseran akibat kebijakan dari pemerintah pusat dalam hal pengelolaan anggaran tahun 2020. Pelayanan pengawasan telur dan daging juga menjadi kurang efektif dari aspek program atau rencana karena belum terealisasinya kebutuhan tenaga pegawai yaitu dokter hewan.
2. Efektivitas pelayanan program pengawasan daging dan telur melalui aspek tugas atau fungsi dapat dilakukan dengan baik sekalipun UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Masyarakat Provinsi Sulawesi Utara masih diperhadapkan dengan keterbatasan tenaga ahli dan anggaran. Hal ini terjadi karena sarana laboratorium yang dimiliki sangat memadai dalam melakukan pemeriksaan serta adanya dukungan kerja tim pegawai. Pembentukan tim kerja yang dikoordinasikan langsung oleh dokter

hewan yang ada saat ini dinilai efektif dalam pelayanan program pengawasan daging dan telur.

3. Efektivitas pelayanan program pengawasan daging dan telur melalui aspek ketentuan dan peraturan sangat baik karena UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Masyarakat Provinsi Sulawesi Utara dalam hal pembentukan organisasi sampai dengan operasional kerja didasarkan atas kebijakan mulai dari Undang – Undang sampai dengan Standart Operasional Prosedur yang jelas.

### Saran

Guna menyelesaikan permasalahan dalam mewujudkan efektifitas pelayanan program pengawasan daging dan telur di UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Masyarakat Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana aspek rencana atau program, aspek tugas atau fungsi dan aspek ketentuan dan peraturan atau kebijakan maka disarankan :

1. Melakukan penambahan pegawai khususnya dokter hewan.
2. Melakukan penyesuaian kebutuhan khususnya pada anggaran operasional
3. Pola penyelesaian kerja melalui pembentukan tim dengan koordinasi dokter hewan agar tetap dipertahankan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, Sahya. 2012. Ilmu Administrasi Negara. Bandung : CV Pustaka Setia
- Gibson, Donnelly, Jr, dkk. 1987. Organisasi dan Manajemen, Jakarta: Erlangga.
- Gibson, James L. 1990. Organisasi: Perilaku, Struktur, Proses (Jilid II). Jakarta: Erlangga.
- Gibson, James L. 2005. Transformasi Pelayanan Publik. Jakarta: Erlangga
- Mubyarto. 2010. Membangun Sistem Ekonomi. Yogyakarta: BPPE.
- Keban, Yeremias T. 2004. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Kurniawan, Agung. 2005. Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta: Pembaharuan.
- Lestari, Sri Rahayu. 2012. Bantuan Sosial di Indonesia (Sekarang dan ke Depan). Bandung: Fokusmedia.
- Mahmudi. 2005. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Muasaroh. 2010. Aspek-aspek efektifitas study tentang efektifitas pelaksanaan program
- Nawawi, H. 1994. Penelitian Terapan. Yogyakarta: Gajah Mada University Press..
- Pidakarta, Made, 2007. Landasan kependidikan. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Pasolong, Harbani. 2012. Metode Penelitian Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
- Siagian, S. P. 1986. Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi. Jakarta: Gunung Agung.
- Sumodiningrat, Gunawan. 2011. Membangun Perekonomian Rakyat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharno, 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Jakarta: Ombak Dua.
- Strees, Richard M. 1985. Efektifitas Organisasi. Jakarta: PPM. Erlangga.
- Teori, dan Isu. Jakarta: Gava Media.
- Sumber lain:
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 18 tahun

- 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. asal 58 ayat (1)
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- Peraturan Menteri Pertanian No 44/permentan/OT140/5/2007 tentang Pedoman Berlaboratorium Veteriner Yang Baik (Good Veterinary Laboratory Practice).
- Surat Keputusan Direktur Jendral Peternakan Nomor 103/TN.510/Kpts/DJP/0398 tahun 1998 tentang jenis – jenis penyakit hewan menular yang mendapat prioritas pengendalian.
- Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara.